



Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia

Jonathan Cahyadi *

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : jonatancahyadi12@gmail.com *

Abstract, *This study examines the role of social media in monitoring and preventing corruption in Indonesia, an issue that has become a primary concern among the public and government. With the increasing number of social media users in the country, these platforms are expected to serve as effective tools in enhancing public participation in overseeing corrupt practices. The research explores various aspects, including how social media enables the community to report corruption cases, share information, and build collective awareness about the impact of corruption. Additionally, this study highlights the challenges faced in utilizing social media, such as unequal access, negative responses from authorities, and the phenomenon of information fragmentation that can hinder constructive dialogue among the public. Through a literature review approach, this research analyzes various relevant sources to provide in-depth insights into the impact and effectiveness of social media in preventing corruption. The findings of this study are expected to offer recommendations for maximizing the potential of social media as a tool to support transparency and public accountability in Indonesia. With a better understanding of the role of social media, it is hoped that both the public and government can collaborate more effectively in the fight against corruption, thereby creating a cleaner and more accountable environment for future generations.*

Keywords: *Social Media, Corruption, Transparency and Accountability*

Abstrak, Penelitian ini mengkaji peran media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, sebuah isu yang menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatnya pengguna media sosial di tanah air, platform ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik korupsi. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk bagaimana media sosial memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi, berbagi informasi, dan membangun kesadaran kolektif tentang dampak korupsi. Selain itu, studi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan media sosial, seperti akses yang tidak merata, respon negatif dari pihak berwenang, serta fenomena fragmentasi informasi yang dapat menghambat dialog konstruktif di antara masyarakat. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber yang relevan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak dan efektivitas media sosial dalam pencegahan korupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan potensi media sosial sebagai alat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi lebih efektif dalam upaya memerangi korupsi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel untuk generasi mendatang.

Kata kunci : Media Sosial, Korupsi, Transparansi dan Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya pembangunan dan pemerintahan yang baik. Praktik korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, mulai dari reformasi kebijakan hingga penguatan lembaga pengawas. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh kurangnya transparansi dan partisipasi

masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial muncul sebagai alat yang menjanjikan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi.

Media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat dan menyampaikan informasi penting. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi secara real-time, memfasilitasi diskusi publik, dan mobilisasi gerakan sosial. Dalam konteks pengawasan korupsi, media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mengungkap praktik korupsi, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Pentingnya media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi terlihat dari kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan jutaan pengguna aktif, media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai praktik-praktik korupsi dan melaporkan penyimpangan yang terjadi. Selain itu, melalui kampanye-kampanye yang diadakan di media sosial, masyarakat dapat dibekali pengetahuan mengenai hak-hak mereka serta cara melaporkan dugaan korupsi, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pemerintah.

Data terbaru dari GoodStats menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 167 juta pengguna media sosial, yang setara dengan 60,4% dari total populasi Indonesia yang mencapai 276,4 juta. Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan media sosial di Indonesia adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data demografis, pengguna media sosial di Indonesia terdiri dari 53,2% pria dan 46,8% wanita. Proporsi ini menunjukkan bahwa kedua gender memiliki akses yang relatif seimbang terhadap media sosial, yang menjadi kesempatan bagi semua kalangan untuk terlibat dalam diskusi dan aksi-aksi yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Di antara berbagai platform media sosial, Facebook dan Instagram adalah yang paling banyak digunakan, diikuti oleh Twitter dan TikTok. Setiap platform memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda, sehingga dapat digunakan dengan cara yang berbeda pula dalam konteks pengawasan korupsi. Misalnya, Facebook sering digunakan untuk berbagi artikel dan diskusi panjang, sementara TikTok dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat dan menarik, yang dapat menjangkau generasi muda.

Meningkatnya pengguna media sosial berkontribusi pada kesadaran masyarakat tentang isu-isu korupsi. Berbagai kampanye anti-korupsi yang dilakukan melalui platform ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan publik, tetapi juga memicu diskusi yang lebih luas mengenai integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Ketika masyarakat lebih teredukasi tentang masalah ini, mereka menjadi lebih waspada dan lebih berani untuk melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka temui.

Media sosial juga berperan penting dalam mobilisasi gerakan sosial yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Melalui hashtag, video, dan postingan informatif, gerakan-gerakan ini dapat dengan cepat menjangkau khalayak luas, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam aksi nyata, seperti demonstrasi, petisi, atau pelaporan kasus korupsi kepada lembaga berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengorganisir dan melibatkan masyarakat dalam upaya kolektif melawan korupsi. Media sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan memanfaatkan platform ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam mengawasi tindakan pemerintah, melaporkan praktik korupsi, dan mendukung kampanye anti-korupsi. Namun, untuk memaksimalkan peran media sosial dalam pemberantasan korupsi, diperlukan kesadaran, pendidikan, dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. RUMUSAN MASALAH

Untuk memahami lebih dalam bagaimana media sosial dapat berkontribusi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang memengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada dua rumusan masalah utama yang akan membantu dalam mengeksplorasi peran media sosial dalam konteks tersebut, diantaranya:

1. Bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik korupsi di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan media sosial sebagai alat pencegahan korupsi di Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur, yang melibatkan analisis berbagai sumber akademis, laporan, dan artikel terkait mengenai peran

media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur yang relevan, peneliti dapat memahami bagaimana media sosial telah berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga akan mencakup evaluasi terhadap studi-studi sebelumnya yang membahas dampak media sosial pada transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai topik ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana media sosial berkontribusi dalam pengawasan korupsi dan bagaimana peran ini dapat dioptimalkan di masa depan.

4. PEMBAHASAN

Bagaimana Media Sosial Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Praktik Korupsi di Indonesia

Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman, melaporkan kejadian, dan berpartisipasi dalam diskusi terkait isu-isu korupsi. Hal ini menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi tindakan pemerintah serta lembaga publik lainnya.

Salah satu cara media sosial meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kampanye kesadaran publik yang efektif. Melalui platform seperti Twitter dan Facebook, berbagai organisasi masyarakat sipil dan individu dapat meluncurkan kampanye yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dengan penggunaan hashtag yang menarik perhatian, masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas, seperti #StopKorupsi atau #AyoAwasi. Kampanye ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang korupsi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui di lingkungan mereka. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi secara real-time. Ketika praktik korupsi terungkap, pengguna media sosial dapat segera mempublikasikan berita tersebut, lengkap dengan bukti-bukti pendukung. Hal ini memberikan tekanan sosial yang signifikan kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Misalnya, jika seseorang mengunggah video atau

gambar yang menunjukkan tindakan korupsi, informasi tersebut dapat dengan cepat menyebar, menarik perhatian media dan publik, sehingga mendorong penegak hukum untuk bertindak.

Media sosial juga berperan dalam membangun komunitas yang peduli terhadap isu-isu korupsi. Dengan adanya grup atau forum di platform seperti Facebook, individu yang memiliki minat yang sama dapat berkumpul dan berbagi informasi, pengalaman, serta strategi untuk melawan korupsi. Komunitas ini dapat berfungsi sebagai jaringan dukungan yang saling membantu dalam mengumpulkan data dan menyusun laporan yang lebih komprehensif mengenai praktik-praktik korupsi yang terjadi. Selain itu, komunitas ini dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anggotanya, meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks pengawasan publik.

Di sisi lain, media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan institusi pemerintah dan aparat penegak hukum. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, mengeluhkan masalah, atau meminta klarifikasi terkait tindakan yang dianggap mencurigakan. Respons dari pemerintah atau lembaga terkait dapat dilihat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan masalah mereka direspons dengan baik, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Penting untuk diingat bahwa partisipasi masyarakat yang efektif melalui media sosial juga memerlukan pemahaman yang baik tentang cara menggunakan platform tersebut. Disinformasi dan berita palsu dapat merusak upaya pengawasan, sehingga pendidikan literasi digital sangat penting. Dengan memberikan pelatihan atau informasi yang memadai tentang cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, masyarakat dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan laporan mengenai praktik korupsi.

Secara keseluruhan, media sosial telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Dengan memberikan platform untuk berbagi informasi, membangun komunitas, dan memungkinkan interaksi langsung dengan pemerintah, media sosial dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam upaya memberantas korupsi. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, perlu adanya perhatian terhadap isu disinformasi dan pentingnya literasi digital, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pemanfaatan Media Sosial sebagai Alat Pencegahan Korupsi di Indonesia

Pemanfaatan media sosial sebagai alat pencegahan korupsi di Indonesia memang memiliki banyak potensi. Namun, di balik keuntungannya, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dapat menghambat efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini berkisar dari isu disinformasi hingga keterbatasan literasi digital masyarakat, yang semuanya dapat mempengaruhi upaya kolektif dalam memberantas korupsi. Salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran disinformasi dan berita palsu. Dalam konteks pencegahan korupsi, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Penelitian oleh Shofwan mengungkapkan bahwa di era digital, berita palsu sering kali menyebar lebih cepat daripada fakta sebenarnya, yang mengakibatkan masyarakat menerima informasi yang salah tentang praktik korupsi. Misalnya, laporan palsu mengenai suatu lembaga atau pejabat tertentu dapat merusak reputasi mereka tanpa alasan yang jelas, mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan, dan mengalihkan perhatian dari isu-isu korupsi yang sebenarnya perlu ditangani.

Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna media sosial yang belum sepenuhnya memahami cara membedakan antara informasi yang benar dan salah. Penelitian oleh Natalia menunjukkan bahwa banyak individu yang terlibat dalam diskusi tentang korupsi di media sosial sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana memverifikasi sumber informasi. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah terpengaruh oleh berita palsu atau informasi yang menyesatkan, yang pada gilirannya dapat melemahkan upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan pelatihan dan workshop mengenai literasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar.

Meskipun penggunaan media sosial di Indonesia telah meningkat, tantangan yang berkaitan dengan akses dan infrastruktur tetap menjadi hambatan signifikan. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, akses internet masih sangat terbatas. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan praktik korupsi. Keterbatasan akses menyebabkan ketidakmerataan dalam keterlibatan masyarakat, di mana hanya individu yang berada di wilayah perkotaan dengan koneksi internet yang baik yang dapat aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kampanye anti-korupsi. Sebagai contoh, di daerah-daerah dengan infrastruktur yang buruk, masyarakat sering kali tidak memiliki informasi terkini mengenai praktik korupsi, yang membuat mereka kesulitan untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus korupsi

yang terjadi di sekitar mereka. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat pencegahan korupsi menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pemanfaatan media sosial untuk pencegahan korupsi adalah adanya respon negatif dari pihak berwenang terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika individu berani melaporkan kasus korupsi, mereka sering kali menghadapi risiko berupa ancaman atau intimidasi. Dalam konteks ini, ketidakpastian akan perlindungan terhadap whistleblower dapat mengakibatkan ketakutan yang signifikan di kalangan masyarakat. Banyak yang enggan untuk berbicara atau melaporkan korupsi karena khawatir akan dampak negatif yang bisa mereka alami, baik secara sosial maupun hukum. Ketika rasa takut ini menguasai, partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan akan semakin menurun, dan efektivitas media sosial sebagai alat pencegahan korupsi pun akan terhambat. Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka yang berani melaporkan korupsi menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial juga berperan penting dalam menentukan jenis konten yang terlihat oleh pengguna. Konten yang bersifat sensasional atau kontroversial cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan menjadi viral, sementara informasi yang edukatif dan relevan tentang pencegahan korupsi sering kali terabaikan. Pengguna media sosial mungkin lebih tertarik untuk berinteraksi dengan konten yang menghibur atau menimbulkan kontroversi, dan hal ini dapat mengurangi dampak positif dari kampanye anti-korupsi. Ketika konten yang mendidik tentang pencegahan korupsi tidak muncul di linimasa pengguna, kesadaran masyarakat terhadap isu-isu korupsi akan berkurang. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi penyelenggara kampanye anti-korupsi untuk merancang strategi komunikasi yang menarik dan sesuai dengan algoritma media sosial, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Fenomena fragmentasi informasi di media sosial juga menjadi tantangan signifikan. Dalam banyak kasus, pengguna media sosial terjebak dalam "echo chambers" atau ruang gema di mana mereka hanya berinteraksi dengan individu yang memiliki pandangan serupa. Ini menyebabkan pembentukan kelompok-kelompok yang terpisah, di mana setiap kelompok cenderung menolak pandangan dari luar. Ketika masyarakat tidak terbuka terhadap berbagai perspektif, upaya untuk menciptakan dialog yang konstruktif tentang masalah korupsi menjadi sulit dicapai. Hal ini tidak hanya membatasi pemahaman masyarakat tentang isu-isu korupsi yang lebih luas tetapi juga mengurangi kemungkinan kolaborasi dalam mengatasi masalah

tersebut. Untuk memitigasi masalah ini, penting untuk mendorong diskusi terbuka dan inklusif, serta memfasilitasi interaksi antara berbagai kelompok di media sosial agar kesadaran dan pemahaman terhadap isu korupsi dapat tumbuh secara holistik. Tantanga -tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memiliki potensi besar sebagai alat pencegahan korupsi di Indonesia, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya. Penguatan infrastruktur, perlindungan bagi whistleblower, adaptasi terhadap algoritma media sosial, dan pengurangan fragmentasi informasi merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa media sosial dapat digunakan secara optimal dalam memerangi korupsi.

5. KESIMPULAN

Penelitian mengenai ini menunjukkan bahwa platform ini memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi praktik korupsi. Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat, media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk berbagi informasi secara real-time, tetapi juga berfungsi sebagai alat mobilisasi untuk kampanye anti-korupsi yang dapat memperkuat kesadaran kolektif. Namun, tantangan seperti akses yang tidak merata, respons negatif dari pihak berwenang, dan fragmentasi informasi tetap menjadi kendala yang perlu diatasi. Melalui studi ini, disarankan agar semua pihak—termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya—berkolaborasi untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M Fikri, Henny Dewi, Laras Ati, and Ardian Sukarson. “PERAN TIKTOK DALAM MENINGKATKAN BRAND AWARENESS.” *Journal Media Public Relations* 4, no. 1 (2024): 52–57.
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.” *Jurnal El-Faqih* 5, no. 1 (2019): 78–85.
- Ema, dan Luluatu Nayiroh. “KOMUNIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT MOBILISASI GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA Ema1,.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi* 9, no. 1 (2024): 221–238.
- Hasan, Zainudin. “IMPLIKASI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI PROVINSI LAMPUNG.” *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018).

- Hasan, Zainudin, and Maya Zulvi Astarida. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 11, no. 1 (2023): 128–140.
- Natalia, Desca Lidya. "Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2022): 57–73.
- Rizky, Muchamad Catur. "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret." *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 407–419.
- Syukerti, Nanda, and Ahmad Iman Mulyadi. "Media Sosial Sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja." *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha* 2, no. 2 (2022): 1–10.
- Winarta, Shofwan Dana, Gilang Jibriel Aqsha, and Aryaduta Prasetya. "Komunikasi Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Menerima Berita Hoax Di Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (2022): 194–202.
- Wulandari, Bagus Ramadi. "PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS KORUPSI DAN DAMPAK TERHADAP OPINI PUBLIK." *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2023).